

Perkembangan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-1990

Nadia Kusuma Sari

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-Mail: nadiakusuma22@yahoo.com

M. Ali Haidar

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin cepat menimbulkan kekhawatiran akan meledaknya jumlah penduduk. Keadaan ini juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah mengambil kebijakan kependudukan Keluarga Berencana untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan program Keluarga Berencana menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mensukseskan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan masalah yaitu 1) Apakah upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mensukseskan program Keluarga Berencana tahun 1981-1990, 2) Bagaimana perkembangan program Keluarga Berencana di Bojonegoro tahun 1981-1990, 3) Bagaimana dampak program Keluarga Berencana terhadap masyarakat Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-1990. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan program Keluarga Berencana terhadap masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik pada skripsi ini peneliti melakukan penelusuran sumber berupa data statistik kependudukan Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-1990, buku-buku mengenai program Keluarga Berencana, artikel, skripsi dan jurnal yang relevan serta wawancara dengan pelaku Keluarga Berencana untuk menguatkan data yang ada.

Hasil dari penelitian ini, berhasil diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama : Hasil penelitian ini menjelaskan perkembangan penerapan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro antusias terhadap program Keluarga Berencana. Pada tahun 1981-1990 jumlah peserta keluarga Berencana selalu meningkat setiap tahunnya. Kenaikan jumlah peserta Keluarga Berencana tahun 1981-1990 mencapai 85,5%. Kedua : Keluarga Berencana menyebabkan terjadinya kestabilan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 1981-1990. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk pada tahun 1981-1990 sebesar 0,95%. Rata-rata jumlah anggota keluarga juga dapat diturunkan sebesar 0,43 % pada tahun 1990. Akibat penekanan jumlah penduduk, jumlah keluarga yang kecil, maka kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi. Sehingga dampaknya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Keluarga Berencana, Penduduk.

ABSTRACT

Indonesian population growth the faster raises concerns about the population explosion. This situation also occurs in Bojonegoro, the Government adopted a policy of family planning population raises the pros and cons in the communities in Bojonegoro. Various attempts were made by the government to succeed in family planning in Bojonegoro.

Formulation of the problem: 1) Is the government's efforts to succeed in Bojonegoro district family planning program in 1981-1990, 2) How is the development of family planning programs in Bojonegoro years 1981-1990, 3) How does the impact of family planning programs to the community Bojonegoro years 1981-1990. The aim of the study was to assess the impact of family planning programs to the community Bojonegoro. This study uses historical research method includes heuristic, criticism, interpretation and historiografi. To be able memeproleh good results in this thesis the researcher perform a search source in the form of statistical data on population Bojonegoro years 1981-1990, books on family planning programs, articles, theses and journals as well as interviews with relevant actors to strengthen family planning available data .

The results of this research study, the following conclusion was obtained, First: The results of this study describes the development of the implementation of family planning programs in Bojonegoro. Enthusiasism Bojonegoro community is made family planning programs. In the years 1981-1990 the number of participants family planning are increasing every year. The increase in the number of participants in family planning 1981-1990 reached 85.5%. Second: family planning leads to the stability of population increase in the district of Bojonegoro years 1981-1990. Average increase in the amount of occupation in 1981-1990 amounted to 0.95%. The average number of family members can

also be lowered by 0.43% in 1990 As a result of suppression of the population, a small number of family, the economic needs of families are met. So the impact increases in social welfare.

Key words : family plan, inhabitant

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan adalah masalah serius yang harus di hadapi oleh Dunia. Kepadatan penduduk tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia saja melainkan seluruh negara yang sedang berkembang. Masalah yang akan timbul akibat meledaknya jumlah penduduk di dunia adalah ketersediaan jumlah pangan yang tidak sebanding dengan banyaknya penduduk. Selain itu ketersediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jika jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Akibat situasi ini negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya akan mengalami penurunan kesejahteraan serta produktifitas pendapatan. Dalam teori Maltus, faktor kependudukan jumlah penduduk yang berlebihan (*over population*) dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan kemiskinan.¹

Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak lepas dari masalah kebijakan kependudukan yang di anut pada masa awal kemerdekaan atau Orde Lama. Kebijakan kependudukan pada masa itu termasuk dalam negara yang menganut paham pro natalis. Paham pro natalis adalah paham yang menginginkan keberadaan penduduk yang banyak sebagai generasi pengganti akibat tingkat kematian yang terlalu tinggi. Bangsa Indonesia terobsesi menjadi bangsa yang besar, salah satu penopang kebesaran itu jumlah penduduk yang luar biasa. Kebijakan ini yang menyebabkan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin cepat.

Selain alasan tersebut, cepatnya pertumbuhan penduduk juga terjadi karena pemikiran tradisional masyarakat. Bagi kehidupan keluarga, anak merupakan tambahan tenaga yang dapat mencari nafkah dan anak merupakan jaminan hari tua orang tuanya. Disamping itu kehidupan masyarakat agraris di pedesaan masih sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama.²

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terletak di sebelah barat wilayah Jawa Timur dan merupakan daerah agraris. Ciri-ciri sosial budaya masyarakat Bojonegoro adalah masyarakat *paternalistik*, agraris, tidak fanatik dan

mobilitas penduduknya relatif sedang.³ Masyarakat pertanian menginginkan punya anak yang banyak untuk tenaga kerja meringankan beban orang tua. Anak dianggap sebagai faktor produksi sehingga makin banyak anak akan meringankan beban keluarga.

Falsafah jawa yang banyak dianut bahwa banyak anak banyak rejeki⁴ yang terus populer dikalangan masyarakat menimbulkan salah satu hal yang menyebabkan cepatnya pertumbuhan penduduk di pulau jawa, khususnya di Bojonegoro. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menekan pertumbuhan penduduk yaitu dengan program Keluarga Berencana.

Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sebelumnya sudah dianggap tidak relevan lagi karena menyadari permasalahan kependudukan yang semakin rumit dan bersifat multidimensional. Kebijakan sebelumnya yang bersifat pronatalis dirubah menjadi antinatalis. Jumlah penduduk yang tinggi dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi sekiranya perlu dikendalikan.⁵

Keluarga Berencana adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Awalnya lembaga ini bernama LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional), berdiri pada tahun 1969. LKBN yang merupakan badan semi pemerintah. Pada tahun 1970 kegiatan ini ditingkatkan lagi menjadi suatu kegiatan penuh pemerintah dengan mengganti badan yang mengelolanya dari LKBN menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).⁶

Tujuan dari program Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus

¹ Faturachman Dkk. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakannya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2004. Hlm. 71

² Maftuchah Yusuf. *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana. 1985. Hlm. 72

³ Yang di maksud paternalistik adalah sistem sosial yang menggunakan ukuran laki-laki yang menentukan dalam suatu keluarga. Lihat di : Tim BKKBN Jawa Timur. *Monografi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun 1998/1999*. Surabaya : BKKBN Propinsi Jawa Timur. 1999. Hlm. 9

⁴ Algiers Rahim Dkk. *Pengetahuan Dasar Program Keluarga Berencana Bagi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1987. Hlm. 24

⁵ Faturachman Dkk. Op., cit. Hlm. 22

⁶ Indan Entjang. *Pendidikan Kependudukan & Keluarga Berencana*. Jakarta: Alumni.1981. Hlm. 22

dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.⁷

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, Penanaman NKKS (Norma Keluarga Kecil Sejahtera) juga terus ditanamkan dalam pemahaman masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera yang merupakan salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program yang dinilai sukses di Indonesia. Pada umumnya sterilisasi dan aborsi tidak dapat diterima secara kultural dan secara religius, sehingga program dilakukan terutama dengan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra-uterus. Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar dalam program KB. Ditambah fakta bahwa organisasi Islam tidak menentang langkah-langkah ini, maka tercapailah hasil yang mengesankan.⁸

Berhasilnya program kependudukan yang dikoordinir oleh BKKBN sejak tahun 1970 dinilai berhasil karena komitmen pemerintah yang nampak pada kesungguhannya untuk mengeluarkan dana meliputi jumlah lebih dari 31,5 milyar rupiah dan bantuan dari asing sebanyak \$ 50 juta.⁹

Pelaksanaan program Keluarga Berencana ini menimbulkan pengaruh terhadap beberapa bidang. Seperti dalam bidang sosial ekonomi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada masa awal penerapan program Keluarga Berencana di Bojonegoro pada khususnya, tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar berada pada daerah pedesaan yang pada umumnya sulit untuk menerima pengaruh baru yang masuk dalam kehidupan mereka. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna mensukseskan program Keluarga Berencana dan pengaruh yang ditimbulkan ini menarik untuk dikaji.

Penerapan sebuah program pasti akan menimbulkan sebuah perubahan yang bersifat multidimensional. Penelitian ini akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini tentunya harus disertai alasan serta penjelasan yang relevan untuk membuktikan kebenaran yang ada pada kondisi pada waktu itu.

METODE

Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-1990 serta dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan

menganalisa secara kritis reksaman peninggalan masa lampau.¹⁰

Dalam kajian keilmuan, metode sejarah merupakan seperangkat prosedur, alat atau piranti yang digunakan sejarawan dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah.¹¹ Dalam metode penelitian sejarah terdapat empat langkah diantaranya adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Langkah pertama adalah heuristik. Menurut terminologinya heuristik dari bahasa Yunani heuritiken artinya mengumpulkan sumber.¹² Sumber-sumber yang diperlukan adalah sumber primer maupun sumber sekunder. Studi ini sebagian besar didasarkan atas sumber-sumber berupa arsip data statistik Kabupaten Bojonegoro, sumber-sumber arsip yang telah didapatkan peneliti adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro yang berjudul *Bojonegoro Dalam Angka* yang pada tahun 1981-1990. Pencarian sumber primer tersebut, dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur untuk mendapatkan sumber data statistik kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-1990.

Selain sumber primer tersebut, sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku-buku mengenai *program Keluarga Berencana dan Sejarah Kabupaten Bojonegoro*, Panitia Penggali dan penyusun sejarah hari jadi Kabupaten Daerah tingkat II yang berjudul *Sejarah Kabupaten Bojonegoro "Menyikap Kehidupan dari Masa ke Masa" tahun 1900-1983* yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berjudul *Informasi Dasar Program Kependudukan KB*.

Karya BKKBN yang menjelaskan tentang informasi serta pentingnya program Keluarga Berencana, Bagian Hukum dan Tata Usaha bantuan Luar Negeri yang berjudul *Himpunan Surat-Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Periode 1981* berisi tentang perkembangan kebijakan, pengaturan-pengaturan keputusan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana karya Badan Pusat Keluarga Berencana Nasional, Departemen Penerangan RI yang berjudul *Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto di depan Sidang Umum MPR Republik Indonesia 11 Maret 1983* mengenai instruksi Presiden Soeharto untuk lebih meningkatkan program Keluarga Berencana. Buku-buku yang berisi tentang masalah Keluarga Berencana serta kependudukan, artikel, skripsi dan jurnal yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

Pencarian sumber sekunder tersebut dilakukan di Perpustakaan pusat UNESA, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Bank Indonesia, Perpustakaan Pusat Kampus B Universitas Airlangga di Surabaya. Kunjungan yang dilakukan di tempat-tempat tersebut

⁷ Ibid., Hlm. 23

⁸ M.C Riclefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi. 2008. Hlm. 633

⁹ Kompas, 9 Juli 1997. Hal. 4

¹⁰ Aminuddin Kasdi. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. 2008. Hlm. 27

¹¹ Ibid., Hlm. 10

¹² Suhartono W. Pranoto. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Hlm. 29

bertujuan untuk mencari referensi dari buku-buku, jurnal dan skripsi yang relevan dengan tema penelitian.

Untuk menguatkan data yang telah ada penulis juga melakukan wawancara terhadap petugas Keluarga Berencana serta peserta Keluarga Berencana pada tahun 1980-an.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini adalah melakukan kritik. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.¹³ Sumber yang sudah dikumpulkan disusun berdasarkan klasifikasi urutan pembahasan. Kritik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan kritik intern yaitu mengidentifikasi sumber untuk menelaah isi dokumen untuk menjadi fakta. Tahap selanjutnya ialah Interpretasi sumber yaitu melakukan eksplanasi fakta dengan menghubungkan antar fakta untuk membantu dalam penjelasan. Pendekatan ilmu bantu membantu merekonstruksi eksplanasi fakta menjadi sebuah cerita yang menarik. Hasil rekonstruksi fakta yang telah disusun, ditulis dengan historiografi yang menarik.

Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran terhadap semua sumber yang diperoleh baik sumber primer maupun sekunder untuk menentukan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada terhadap pembahasan yang akan dikaji penulis.

Tahap terakhir adalah Historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.¹⁴ Pada tahap ini data-data yang telah diolah akan disusun menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penulisan ini adalah dampak program Keluarga Berencana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro berada pada propinsi Jawa Timur terletak pada 111°25'-112°09' Bujur Timur dan 6°59' – 7°37' Lintang Selatan dan terletak di bagian barat Propinsi Jawa Timur. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban
2. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah).¹⁵

¹³ Ibid., Hlm. 35

¹⁴ Aminuddin Kasdi. 2008. Op., cit. Hlm. 11

¹⁵ Bappeda. *Pengkajian Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Bojonegoro*. 2002. Bojonegoro : Bappeda. Hlm. 1

Kabupaten Bojonegoro mempunyai luas daerah sebesar 2.309,85 Km² dan terbagi dalam beberapa daerah administratif. Pada tahun 1981 wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 20 kecamatan dan 430 desa. Pembagian daerah administratif Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Banyak Kecamatan serta Desa
di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 1981

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bojonegoro	26
2	Dander	16
3	Kapas	35
4	Balen	23
5	Sugihwaras	29
6	Baureno	25
7	Kanor	25
8	Sumberejo	26
9	Kedungadem	23
10	Kepohbaru	25
11	Kalitidu	25
12	Ngasem	23
13	Malo	23
14	Bubulan	12
15	Padangan	16
16	Purwosari	12
17	Kasiman	15
18	Tambakrejo	18
19	Ngraho	22
20	Ngambon	11
Jumlah		430

Sumber: Bappeda Jawa Timur. *Profil Daerah Tingkat II Se Jawa Timur 1969-1982*. Bojonegoro : Bappeda. 1983. Hlm. 3

Mengenai masalah program Keluarga Berencana peneliti terlebih dahulu mengamati masalah demografi di Kabupaten Bojonegoro. Demografi adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan penduduk atau manusia. Definisi demografi secara luas meliputi, ciri sosial, ras, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perkawinan, makanan, energi, urbanisasi, tenaga kerja, keluarga berencana, pengaruh penduduk atas lingkungan.¹⁶

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup pesat. Kondisi tersebut menimbulkan peranan program Keluarga Berencana sangatlah penting bagi Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Bahkan permulaan kebijakan program Keluarga Berencana masa Orde Baru belum mampu untuk mengendalikan angka kelahiran anak pada Kabupaten Bojonegoro.

Pendidikan

Memberikan pendidikan yang layak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Anak merupakan karunia Tuhan yang paling berharga bagi kehidupan keluarga yang perlu disyukuri dengan cara

¹⁶ DR. RK. Sembiring. *Demografi*. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta dengan BKKBN Jakarta. 1985. Hlm. 7

memenuhi segala hak anak.¹⁷ Melalui dasar tersebut tujuan memberikan pendidikan bagi anak dari setiap orang tua adalah sikap yang wajar di timbulkan] disebabkan karena belum meratanya petugas sosialisasi program Keluarga Berencana di setiap daerah yang sulit di jangkau para petugas, misalnya seperti Kecamatan Ngraho, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Tambak Rejo.

Jumlah sekolah dapat di lihat pada tabel perkembangan jumlah Sekolah Dasar, SMTA, SMTP dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1968-1980 sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Sekolah Dasar, SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1969-1980

Tahun Ajaran	SD	SMTP	SMTA	Perguruan Tinggi
1969/1970	334	-	-	-
1970/1971	334	-	-	-
1971/1972	334	-	-	-
1972/1973	349	-	-	-
1973/1974	362	-	-	-
1974/1975	412	22	11	-
1975/1976	412	24	10	-
1976/1977	497	24	11	-
1977/1978	577	43	12	-
1978/1979	539	43	12	-
1979/1980	597	43	12	-
1980/1981	612	58	21	-

Sumber: Bappeda Jawa Timur. *Profil Daerah Tingkat II Se Jawa Timur 1969-1982*. Bojonegoro : Bappeda. 1983. Hlm. 24

Berdasarkan pada tabel tersebut bahwa pada tahun 1970-1974 jumlah Sekolah Dasar mencapai angka lebih dari 300 sekolah. Hal tersebut disebabkan karena untuk memenuhi program pemerintah wajib belajar 6 tahun, sampai tahun 1982 jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 1970-1974 sekolah SMTP, SMTA tidak ada, baru pada tahun 1975-1981 SMTP dan SMTA pada angka mencapai 54 dan 21 sekolah. Bahkan pada tahun tersebut belum ada perguruan tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi tersebut yang menyebabkan tingkat putus sekolah yang tinggi pada tahun 1970-1980 setelah sekolah di Sekolah Dasar.

Kesehatan

Jumlah pelayanan kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah menyebabkan tingkat kesehatan masih relatif rendah. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan pengembangan dalam bidang kesehatan dengan pengembangan puskesmas, peningkatan rumah sakit umum dan perbaikan sanitasi masyarakat dengan penyediaan air bersih dan jamban keluarga.

Kebijakan Kependudukan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang jauh melebihi jumlah fasilitas kebutuhan hidup yang tersedia menyebabkan sebagian besar penduduk berada dalam kehidupan serba kekurangan. Berada dibawah garis kemiskinan jauh dibawah taraf hidup sederhana. Keadaan ini diperburuk dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk yang menghambat perkembangan sosial dan ekonomi.¹⁸

Di Indonesia kebijakan kependudukan telah digariskan dalam GBHN. Beberapa butir penting yang erat kaitannya dengan dengan kebijakan kependudukan antara lain :

1. Kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara merata dan menyeluruh dan dituangkan dalam program yang terpadu.
2. Kebijakan kependudukan yang perlu ditangani antara lain: bidang pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian terutama kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, pola urbanisasi yang lebih seimbang dan merata.
3. Agar pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan cepat, perlu dilakukan pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.
4. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.
5. Pelaksanaan Keluarga Berencana ditempuh dengan cara-cara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Keluarga Berencana adalah daya upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila demi untuk kesejahteraan keluarga.²⁰

Tonggak awal penerapan konsep pengaturan dan pembatasan kelahiran di Indonesia dengan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957. Ruang Gerak PKBI pada masa itu masih terbatas karena Pemerintahan Orde Lama yang berkuasa pada masa itu menganut kebijakan pro natalis.

Pada masa Orde Baru program Keluarga Berencana mendapat persetujuan dari pemerintah, ditandai dengan penandatanganan deklarasi PBB mengenai kependudukan dan pendirian Lembaga

¹⁸ Indan Entjang. 1981. Op., cit. Hlm. 9

¹⁹ RK. Sembiring. *Demografi*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN. 1985. Hlm. 153

²⁰ Indan Entjang. 1981. Op., cit. Hlm. 22

¹⁷ Indan Entjang. *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Bandung : Alumni. 1986. Hal. 18

Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada bulan oktober 1968.²¹

Melalui Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 1970, LKBN di ganti menjadi Badan Koordinasi Kelurga Berencana Nasional (BKKBN) dan program KB dimasukkan ke dalam Repelita I. Struktur BKKBN merupakan badan koordinasi dan bukan merupakan bagian dari Departemen Kesehatan.

Pada awalnya BKKBN mencanangkan cukup tiga anak atau pancawarga, namun dalam perkembangannya kemudian menjadi “cukup dua anak”. Atau catur warga. Perubahan ini dilaksanakan pada tahun 1980 dengan melakukan intensifikasi program Keluarga Berencana, BKKBN menciptakan strategi yang disebut “Panca Karya”.²² Isi dari strategi Panca Karya yaitu:

- 1.Karya 1, PUS (Pasangan Usia Subur) dibawah usia 30 tahun dan atau yang mempunyai dua anak, kepada mereka dianjurkan agar merasa puas dan bahagia dengan memiliki dua orang anak saja, serta segera menjadi anggota Keluarga Berencana yang lestari
- 2.Karya 2, PUS diatas usia 30 tahun atau mempunyai anak lebih dari dua orang, agar mereka puas dengan jumlah anak yang sudah ada dan segera mengikuti Keluarga Berencana serta melanjutkan peningkatan kesejahteraan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Pada orang tua yang sudah terlanjur memiliki banyak anak diharapkan untuk ikut serta melestarikan Keluarga Berencana.
- 3.Karya 3, generasi muda diharapkan dapat menerima dan membudayakan sikap positif rasional sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Sejahtera (NKKBS). Ini merupakan suatu proses untuk menyiapkan generasi muda menjadi subyek pembangunan gerakan Keluarga Berencana dimasa yang akan datang.
- 4.Karya 4, Mendorong proses pelebagaan dan pembudayaan fisik, sosial dan ekonomi sehingga masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat melanjutkan perjuangan melembagakan dan membudayakan NKKBS.
- 5.Karya 5, Mempercepat proses pelebagaan dan pembudayaan mental spiritual dengan mengembangkan sikap mendukung, lingkungan, budaya yang positif, sikap mandiri dengan semangat dan motivasi yang tinggi serta pandangan masa depan yang penuh dengan optimisme dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.²³

²¹ Dadang julianto. *30 Tahun Keluarga Berencana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan PKBI Yogyakarta. 2000. Hlm. 7

²² Ibid., Hlm. 10

²³ Peter Patta Sumbung. *Meningkatkan Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*

Pemakaian alat kontrasepsi adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi, metode kontrasepsi Keluarga Berencana dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kontrasepsi yang tidak menetap dan yang menetap. Metode kontrasepsi Keluarga Berencana yang tidak menetap dan yang menetap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3
Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Berdasarkan Jenisnya

No	Menetap	Tidak Menetap
1	Tubektomi	Cara-cara sederhana/ tradisional
2	Vasektomi	Pil KB
3	-	Suntik KB
4	-	IUD

Sumber: Indan Entjang. *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Alumni. 1981. Hlm. 81. Diolah oleh penulis.

Perkembangan alat kontrasepsi modern mulai diperkenalkan dan resmi digunakan di Indonesia kelompok pertama muncul adalah Pil KB, Suntik KB, IUD (Intra Uterine Device) dan kondom pada tahun 1970. Alat kontrasepsi ini digunakan bersamaan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana awal tahun 1970. Berikutnya muncul alat kontrasepsi kelompok yang kedua yaitu Tubektomi (Sterilisasi pada wanita) dan Vasektomi (Sterilisasi pada pria) mulai resmi diperkenalkan dan digunakan pemerintah pada tahun 1980.

Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro

Program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan oleh BKKBN dan dilaksanakan secara nasional. Untuk itu pelaksanaannya disetiap daerah tidak jauh berbeda. Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Kepala BKKBN Kabupaten Bojonegoro dan dilaksanakan oleh PLKB pada tingkat kecamatan.

BKKBN merupakan lembaga independen dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program Keluarga Berencana. Keadaan seperti itu terjadi selama sebelum adanya otonomi daerah di Indonesia. Koordinasi organisasi BKKBN dilaksanakan melalui intruksi presiden yang di sampaikan kepada menteri negara kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan program kependudukan dan Keluarga Berencana pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro menempuh berbagai upaya, diantaranya adalah:

- 1.Memantapkan program, mendayagunakan secara optimal tenaga yang ada, meningkatkan kegiatan dengan diikuti sistem pelaporan setiap minggu.
- 2.Mempergunakan setiap media medis yang ada secara efektif misalnya media RKPD, media rapat, pertemuan penyuluhan tatap muka,

- forum keagamaan, pemurata film melalui MUPEN dan sebagainya.
3. Meningkatkan pembinaan/ pementapan melalui pendekatan kedinasan, melalui Dharma Wanita, PKK sampai tingkat Desa/ Dukuh dengan demikian diharapkan program tersebut semakin melembaga.
 4. Pengaturan dan pelaksanaan TKBK secara terpadu dengan kegiatan lainnya.
 5. Pemberian penghargaan melalui sistem lomba.²⁴

Program Keluarga Berencana di Bojonegoro pada tahun 1981-1990 diarahkan pada kegiatan peningkatan peserta Keluarga Berencana baru, membina peserta yang aktif dan mengaktifkan kembali peserta Keluarga Berencana yang Drop Out. Peserta yang Drop Out adalah peserta Keluarga Berencana yang berhenti dari program Keluarga Berencana, hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Misalnya, karena meninggal dunia, perceraian, suami yang meninggal dan ketidakpuasan terhadap pelayanan dan alat kontrasepsi Keluarga Berencana. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program dan melalui Mupen (Mobil Pelayanan KB). Sosialisasi program Keluarga Berencana di Bojonegoro dilakukan oleh PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, PPKBD, Sub PPKBD serta Kader KB.

Dalam sosialisasi dilakukan melalui kegiatan KIE. Kegiatan KIE berfungsi mendorong masyarakat agar mau menerima program KB serta membina kemandirian peserta KB dalam mengikuti program tersebut. Kegiatan KIE juga memberikan penerangan terhadap penanganan golongan atau masalah khusus yang bertujuan untuk memotivasi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan pendekatan-pendekatan spesifik dalam mengikuti program KB.²⁵

Selain upaya sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini telah menganjurkan yang sifatnya mengingatkan kembali dengan memasang logo catur warna sekat di tiap sisi kiri pintu pagar masuk halaman rumah masing-masing. Usaha semacam itu dimaksudkan tanpa bentuk perintah, agar seluruh lapisan masyarakat tidak menambah besarnya anggota keluarganya. Cukup dua anak pria atau wanita sama saja.²⁶

Tahap yang kedua yaitu pelayanan kontrasepsi. Keberhasilan program pembangunan di bidang keluarga berencana berkaitan erat dengan upaya pengembangan sumber daya manusia yang tercermin dalam mutu dan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana. Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990 dilaksanakan melalui pelayanan medis melalui klinik-klinik KB dan Tim Medis KB Keliling.

Pelayanan medis Keluarga Berencana dalam pemberian alat/obat kontrasepsi dilaksanakan secara

bersama dengan pelayan kesehatan yaitu klinik Keluarga Berencana dan BKIA, Puskesmas dan rumah sakit yang ada.

Jumlah tenaga BKKBN juga terus bertambah setiap tahunnya guna menunjang kesuksesan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1981 jumlah tenaga BKKBN sebanyak 143 orang.²⁷ Pada tahun 1985 jumlah pegawai ditambah menjadi 186 orang.²⁸ Pada tahun 1988 jumlah pegawai sebanyak 210 orang.²⁹ Penambahan pegawai setiap tahunnya bertujuan untuk lebih meningkatkan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro.

Penerapan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-1990

Pada awal tahun 1980an peserta program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro semakin meningkat. Hal itu dilihat pada jumlah target yang dicanangkan BKKBN, pada saat realisasinya melebihi target semula. Program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada pasangan usia subur di Kabupaten Bojonegoro. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang baru menikah atau pasangan yang masih produktif.

Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang akan mengikuti program Keluarga Berencana kebanyakan atas dasar kesadaran serta dorongan tetangga yang bersama-sama mengikuti program ini. Kebanyakan dari mereka yang dengan penuh kesadaran mengikuti program Keluarga Berencana adalah masyarakat golongan berkependidikan. Hal tersebut didukung masa orde baru bahwa setiap PNS harus memilih hak politiknya untuk memilih partai Golkar yang juga memiliki kesamaan prinsip dengan Presiden Soeharto ketika itu.³⁰ Selain itu terdapat pula berbagai profesi seperti pedagang serta petani mengikuti program Keluarga Berencana secara sadar dan tidak ada paksaan.³¹ Bahwa berkembangnya peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro ditentukan oleh letak daerah yang terpencil sulit dijangkau maupun daerah yang mudah dijangkau.

Kebanyakan petugas Keluarga Berencana menemui kendala untuk sosialisai pada daerah terpencil yang sulit dijangkau. Terdapat daerah yang sulit dijangkau yang kurang tersedianya

²⁷ BPS. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1981*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. 1982. Hlm. 35

²⁸ BPS. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1985*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. 1983. Hlm. 17

²⁹ BPS. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1988*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. 1989. Hlm. 12

³⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Ba'dlul Quhomah (Peserta Keluarga Berencana) sejak tahun 1984. Pada tanggal 11 Oktober 2014.

³¹ Wawancara dengan Ibu Baninten dan Ibu Murdilah (Peserta Keluarga Berencana) sejak tahun 1984 dan 1988. Pada tanggal 12 Oktober 2014.

²⁴ Ibid. Hlm. 583

²⁵ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Informasi Dasar Program Kependudukan KB*. Jakarta : BKKBN. 1982. Hlm. 63

²⁶ Ibid., Hlm. 640

infrastruktur dan sarana prasarana yang ada, sulitnya akses menuju daerah-daerah. Pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan program ini, masyarakat pedesaan yang pendidikannya masih rendah sulit menerima perubahan serta masyarakat islam kejawan yang masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.³² Daerah-daerah tersebut misalnya, kawasan pedesaan Kecamatan Ngraho yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi serta daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun, daerah pedesaan Kecamatan Ngambon, serta pada kecamatan lainnya yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan PLKB dibantu ABRI, Polisi dan organisasi masyarakat seperti PKK, Darmawanita, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kader-kader yang dibentuk di desa-desa. Terdapat pula pemutaran film mengenai Keluarga Berencana untuk menarik masyarakat. Dengan kegiatan tersebut peserta Keluarga Berencana semakin bertambah dan antusias masyarakat terdorong untuk melakukan program tersebut dengan penuh kesadaran, karena telah mengetahui dampak KB yang telah di informasikan. Terdapat pula paksaan kepada masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana, paksaan untuk masyarakat tertentu, yaitu yang berada di daerah yang sulit dijangkau petugas dan menolak kasar program Keluarga Berencana.

Pelayanan program Keluarga Berencana pada mulanya untuk mendorong masyarakat bersedia, pemerintah menyediakan kontrasepsi gratis beserta obat-obatannya yang termasuk program pemerintah Keluarga Berencana tahun 1981-1990. Setelah masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana dengan penuh kesadaran dan menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan, pelayanan pada masyarakat tersebut diganti menjadi pelayanan KB lestari atau mandiri yang menggunakan biaya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan biaya pemerintah yang keluar untuk program Keluarga Berencana tersebut.³³

Pada perkembangannya petugas PLKB pada setiap kecamatan pada tahun 1980 berjumlah 3-5 orang. Kemudian pada tahun 1985-1990 petugas PLKB di setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 4-6 orang. Banyaknya jumlah petugas PLKB pada setiap kecamatan ditentukan pada jumlah penduduk serta luas wilayah tiap kecamatan yang ada.

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro antusias dalam program Keluarga Berencana. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam program

Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Hingga tahun 1989-1990, antusias masyarakat masih tetap tinggi. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah realisasi lebih besar dari jumlah Pasangan Usia Subur yang di targetkan.

Alat kontrasepsi Keluarga Berencana bermacam-macam. Pemilihan alat kontrasepsi dilakukan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Data mengenai jumlah peserta Keluarga Berencana berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Jumlah Peserta Keluarga Berencana
Menurut Jenis Kontrasepsi Yang di Pakai
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-1990

No	Tahun	Peserta Yang Aktif					Jumlah
		Spiral	Pil	Suntik	Kondom	Lainnya	
1	1981	34.041	57.925	660	1.047	137	93.810
2	1982	41.947	64.535	700	993	266	108.441
3	1983	52.268	56.469	670	2.036	368	111.811
4	1984	71.498	49.666	624	3.664	715	126.167
5	1985	73.964	43.769	5.283	299	897	124.240
6	1986	75.393	53.327	5.067	394	1.176	135.383
7	1987	89.059	62.058	8.956	670	1.234	157.973
8	1988	79.239	58.510	6.697	380	1.587	146.431
9	1989	92.394	62.134	12.854	448	2.948	170.774
10	1990	93.219	57.512	16.536	434	22.384	174.048

Sumber: BKKBN Kabupaten Bojonegoro. Tahun 1981-1990. Diolah oleh penulis.

Data dalam tabel 3.4. merupakan data jumlah akseptor KB di Kabupaten Bojonegoro yang dirinci berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan pada tahun 1981-1990. Jumlah akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 1981 hingga 1990 kenaikan jumlah akseptor sebesar 85,5%. Hal ini sangat menggembirakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun pencapaian akseptor naik hingga lebih dari 50%, hal menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana sangat tinggi.

Dampak Keluarga Berencana Terhadap Kependudukan di Kabupaten Bojonegoro

Pengetahuan, sikap dan perilaku Keluarga Berencana baik pada tingkat wilayah maupun individu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi berbagai aspek pembangunan. Program Keluarga Berencana diyakini berkontribusi dalam penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kematian ibu dan anak usia balita³⁴

Keluarga Berencana merupakan salah satu program kerja pemerintah yang sukses di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan sumberdaya yang besar dalam program Keluarga Berencana. Fakta bahwa organisasi islam tidak menentang langkah-langkah ini,

³² Wawancara dengan Bpk. Muktasim (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PLKB) yang bertugas di daerah Kecamatan Ngambon sejak tahun 1989. Pada tanggal 12 oktober 2014.

³³ Wawancara dengan Ibu Mardijah (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PLKB) yang bertugas di daerah Kecamatan Ngambon sejak tahun 1973-2006. Pada tanggal 12 oktober 2014.

³⁴ Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosir. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta : Salemba Empat.2010. Hlm. 175

maka tercapailah hasil yang mengesankan.³⁵ Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

Suksesnya pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Kesuksesan program ini berpengaruh pada kependudukan penduduk maupun bidang lainnya. Dalam bidang kependudukan, pengaruh positif dari program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990 adalah penurunan pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya. Penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 1980-1990

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		1981	1982	1983	1984	1985
1	Ngraho	54.145	54.545	55.113	55.727	56.273
2	Tambakrejo	44.080	44.231	44.476	44.731	44.852
3	Ngambon	30.887	30.980	30.782	30.866	31.086
4	Ngasem	58.475	58.318	58.271	58.494	58.534
5	Bubulan	33.038	33.449	33.200	33.095	33.408
6	Dander	56.140	56.288	56.258	56.436	56.482
7	Sugihwaras	66.672	66.906	67.861	68.312	68.717
8	Kedungadem	67.915	68.749	69.109	69.852	70.910
9	Kepohbaru	51.717	52.464	53.240	54.084	54.925
10	Baureno	58.142	58.936	59.707	60.825	61.841
11	Kanor	47.900	48.343	48.715	49.099	49.760
12	Sumberrejo	55.454	56.157	56.725	57.400	57.860
13	Balen	50.452	50.421	50.793	51.260	52.917
14	Kapas	68.177	68.875	69.372	69.850	70.386
15	Bojonegoro	88.063	88.899	88.440	88.660	89.228
16	Kalitidu	49.821	50.226	50.516	50.499	51.610
17	Malo	32.735	32.065	32.984	33.153	33.635
18	Purwosari	22.950	23.079	23.185	23.313	23.427
19	Padangan	35.366	35.460	35.514	35.591	38.126
20	Kasiman	34.507	34.469	34.395	34.535	34.705
21	Temayang	34.369	29.438	29.529	19.492	29.830
Jumlah		1.006.636	1.013.098	1.018.185	1.025.289	1.038.512

Lanjutan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		1986	1987	1988	1989	1990
1	Ngraho	57.172	57.715	57.971	58.422	62.265
2	Tambakrejo	45.306	46.381	47.029	47.198	47.422
3	Ngamon	33.313	33.376	33.434	33.599	33.570
4	Ngasem	62.342	62.666	62.879	64.382	64.335
5	Bubulan	33.760	34.379	34.429	31.215	31.311
6	Dander	58.717	58.865	59.110	41.683	40.547
7	Sugihwaras	41.271	41.376	41.393	73.477	73.778
8	Kedungadem	72.638	73.026	72.997	56.907	56.999
9	Kepohbaru	55.738	56.370	56.678	65.902	65.324
10	Baureno	63.143	63.799	64.176	51.585	51.918
11	Kanor	50.431	51.047	51.265	61.337	61.633
12	Sumberrejo	58.477	58.946	60.899	55.351	55.451
13	Balen	54.571	54.776	55.050	75.123	75.488
14	Kapas	74.548	74.761	74.901	93.640	93.570
15	Bojonegoro	90.881	92.120	92.795	59.106	59.020
16	Kalitidu	53.312	53.492	53.937	62.839	62.989
17	Malo	34.706	34.781	34.838	54.396	54.514
18	Purwosari	23.650	24.540	24.670	34.897	35.483
19	Padangan	38.248	38.323	38.349	24.781	24.851
20	Kasiman	36.740	36.829	36.953	38.415	38.426
21	Temayang	30.428	30.916	31.003	37.043	37.050
Jumlah		1.069.365	1.078.484	1.084.756	1.090.298	1.096.044

Sumber: BPS. *Bojonegoro Dalam Angka 1981-1990*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro. Diolah oleh penulis.

Melalui tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990 masih mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya cenderung menurun. Artinya jumlah pertambahan penduduk di Kabupaten Bojonegoro secara perlahan dapat di turunkan. Salah satu penyebab menurunnya angka pertumbuhan penduduk secara perlahan di Kabupaten Bojonegoro karena terjadi perubahan sikap masyarakat yang telah memahami dan mengikuti program Keluarga Berencana. Dengan penekanan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro, jumlah angka kelahiran dapat di kontrol, akibatnya pada tahun 1981-1990 tidak terjadi peningkatan penduduk yang signifikan di Kabupaten Bojonegoro. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk pada tahun 1981-1990 adalah sebesar 0,95%.

Keluarga Berencana juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat mengenai kesehatan. Sebelumnya masyarakat khususnya pedesaan masih asing dengan pelayanan medis. Melalui penerapan Keluarga Berencana yang dalam penanganannya dilakukan medis, masyarakat desa mulai mengenal dan menggunakan jasa medis seperti misalnya, bidan desa.

Kesadaran kesehatan juga ditunjang melalui peningkatan sarana-sarana kesehatan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk melayani kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bojonegoro membangun puskesmas di setiap kecamatan. Jumlah puskesmas pada tahun 1981-1982 tercatat sebanyak 29 puskesmas dengan jumlah tenaga medis dokter puskesmas 15 dan 47 bidan.³⁶ Pada tahun 1983 jumlah puskesmas di Kabupaten Bojonegoro meningkat menjadi 34 dengan tenaga medis terdiri dari 20 dokter puskesmas dan 47 bidan.³⁷

Gerakan Keluarga Berencana Nasional memiliki tujuan yaitu normatif dan demografis. Tujuan normatif berupa tujuan yang bersifat kualitatif yakni menciptakan Norma Keluarga Kecil Sejahtera (NKKKS). Tujuan demografis berupa penurunan fertilitas sebesar 50 % pada tahun 1990 dibanding dengan tahun 1970.³⁸ Tujuan dari NKKKS adalah untuk menciptakan keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang sedikit, agar beban yang ditanggung dalam keluarga menjadi ringan sehingga tercipta keluarga yang sejahtera.

³⁶ Badan Pusat Statistik. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1982*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. 1982. Hlm. 46

³⁷ Badan Pusat Statistik. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1983*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. 1984. Hlm. 29

³⁸ Bagian Hukum dan Tata Usaha bantuan Luar Negeri. *Himpunan Surat-Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Periode 1981*. Jakarta: Badan Pusat Keluarga Berencana Nasional. 1982. Hlm. 4

³⁵ MC Riclef. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Seambi. 2008. Hlm. 633

Keberhasilan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro juga ditandai dengan penurunan rata-rata jumlah anggota keluarga pada setiap wilayah. Penurunan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada tabel di berikut ini

Tabel 6
Rata-rata Anggota Rumah Tangga
Hasil Sensus Penduduk
di Kabupaten Bojonegoro tahun 1980 dan 1990

No	Kecamatan	1980			1990		
		Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata anggota rumah tangga	Penuduk	Rumah Tangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
1	Ngraho	53.159	11.053	4,71	58.963	13.429	4,39
2	Tambakrejo	43.951	8.830	4,98	48.147	10.775	4,47
3	Ngambon	30.702	7.156	4,29	33.624	7.296	4,61
4	Bubulan	32.868	6.680	4,92	33.830	7.760	4,36
5	Temayang	29.169	5.905	4,94	31.473	7.214	4,36
6	Sugihwaras	38.019	7.762	4,89	40.531	9.041	4,48
7	Kedung Adem	67.094	13.512	4,97	74.163	16.832	4,41
8	Kepohbaru	50.751	10.686	4,75	13.222	56.242	4,25
9	Baureno	57.130	12.145	4,70	64.883	14.920	4,35
10	Kanor	46.610	10.282	4,53	50.495	12.583	4,01
11	Sumberrejo	54.756	11.372	4,67	60.463	14.532	4,21
12	Balen	50.346	10.869	4,63	54.957	13.620	4,04
13	Kapas	67.894	14.205	4,78	77.254	17.856	4,33
14	Bojonegoro	88.399	17.007	5,20	99.023	20.793	4,76
15	Dander	55.513	11.259	4,91	62.510	14.398	4,34
16	Ngasem	57.952	12.110	4,79	65.459	14.485	4,52
17	Kalitidu	49.532	10.633	4,66	54.973	12.678	4,34
18	Malo	32.559	7.010	4,64	35.306	8.225	4,92
19	Purwosari	22.911	4.664	4,91	25.478	5.645	4,51
20	Padangan	35.350	7.157	4,94	38.714	8.503	4,55
21	Kasiman	34.401	6.959	4,94	37.457	8.387	4,47
Jumlah		999.066	207.602	4,81	1.103.944	252.014	4,38

Sumber: BPS. *Bojonegoro dalam angka 1990*.
Bojonegoro: Kantor Statistik
Kabupaten Bojonegoro. Hlm. 14

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 1980-1990 terjadi penurunan rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari hasil sensus tahun 1980 dan 1990 dapat dilihat bahwa telah terjadi mengalami penurunan rata-rata anggota keluarga sebesar 0,43 pada tahun 1990.

Keluarga kecil akan lebih menguntungkan bagi keluarga maupun bagi pemerintah. Orang tua lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan terutama pendidikannya. Begitu pula dengan pemerintah sebagai orang tua warganya, akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan warganya, disebabkan jumlah penduduk tidak terlalu banyak.³⁹

³⁹ Indan Entjang. *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Alumni. 1981. Hlm. 21

Dampak Keluarga Berencana terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.

Upaya peningkatan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990 berpengaruh pada tingkat produktifitas pendapatan dari seluruh bidang. Terjadi penekanan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk, setidaknya dengan adanya program Keluarga Berencana ini jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Karena itu kondisi sosial ekonomi masyarakat mulai membaik dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan tersedianya cukup lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat meningkat karena melalui program Keluarga Berencana masyarakat dapat mengatur jumlah anak sehingga beban yang ditanggung keluarga menjadi ringan.

Jumlah penduduk yang terkendali menyebabkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Perusahaan-perusahaan padat karya di Kabupaten Bojonegoro setidaknya dalam setiap tahunnya mampu menampung para pekerja yang mayoritas dari Kabupaten Bojonegoro. Dengan keadaan penduduk yang memiliki suatu pekerjaan yang setidaknya berkecukupan, menyebabkan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro..

Jumlah penduduk yang terkontrol menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Dengan penduduk usia muda yang memiliki pendidikan setidaknya lulusan SMP, terdapat beberapa dari mereka yang bekerja di luar daerah Kabupaten Bojonegoro. Angka pengangguran menurun berdampak pada turunnya tingkat kriminalitas di Kabupaten Bojonegoro karena keresahan sosial, kecemasan warga masyarakat dan peristiwa kejahatan kriminal cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih padat penduduknya.⁴⁰

Kondisi keamanan yang baik menyebabkan para investor bersedia menanamkan modal. Keadaan tersebut di tunjang oleh pendapatan masyarakat yang tinggi, maka tingkat konsumsi masyarakat juga tinggi.

Perkembangan kualitas penduduk ini akan di tunjang oleh peningkatan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Misalnya, bidang pasar umum maupun swalayan, perhubungan, pertambangan, listrik, air minum, restoran, perhotelan, industri-industri, bank, komunikasi, jasa-jasa. Melalui peningkatan berbagai aspek tersebut, intinya akan berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau jumlah pendapatan kotor Kabupaten Bojonegoro.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 1980-1990 tidak lepas dari kontribusi penerapan program Keluarga Berencana di

⁴⁰ Algiers Rahim Dkk. *Pengetahuan Dasar Program Keluarga Berencana Bagi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1987. Hlm. 72

Kabupaten Bojonegoro. Petugas Keluarga Bencana selalu mensosialisasikan program sampai ke pelosok desa di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat target serta realisasi setiap program yang di jalankan setiap tahunnya. Dengan adanya kegiatan tersebut bahwa terdapat rencana-rencana kedepan seluruh jajaran petugas Keluarga Berencana.

Pertumbuhan penduduk juga menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan. Jumlah tempat-tempat pengobatan, dokter dan para petugas kesehatan serta berbagai sarana kesehatan lainnya perlu ditambah setiap tahunnya.⁴¹

Peningkatan partisipasi peserta Keluarga Berencana yang meningkat harus di dukung dengan jumlah fasilitas maupun tenaga kesehatan yang seimbang. Peserta Keluarga Berencana tidak perlu susah lagi untuk mencari tempat konsultasi mengenai KB maupun kesehatan lainnya. Pada tahun 1985 di Kabupaten Bojonegoro perkembangan taraf hidup masyarakat yang meningkat, serta tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro mulai memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan.

Guna menunjang kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah kabupaten Bojonegoro melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan serta tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1990 yang dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 7
Fasilitas Kesehatan dan tenaga Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1990

Failitas kesehatan		Jum lah
1.	SU	1
2.	uskesmas	32
3.	uskesmas Pembantu	57
4.	SU Bersalin	1
5.	osyandu	1.42
6.	obil Unit Pelayanan kesehatan/ Pusling	6
		22
Tenaga Kesehatan		Jum lah
1.	enaga Dokter	43
a.	okter umum	12
b.	ikter gigi	2
c.	okter anak	1
d.	okter kandungan	221
2.	engatur rawat	7
3.	engatur rawat gigi	70
4.		707

⁴¹ Ibid. Hlm. 72

idan	
5.	ukun bayi terlatih

Sumber: BPS. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1990*. 1991. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik.

Pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. pembangunan fasilitas kesehatan hingga ke desa-desa diharapkan dapat merubah pola lama masyarakat pedesaan yang masih asing dengan medis.

Dampak Keluarga Berencana terhadap Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro

Pertumbuhan penduduk yang cepat terutama yang dialami oleh penduduk dengan tingkat ekonomi yang rendah, mengakibatkan para orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada anak, terutama pendidikan anak-anaknya. Dengan semakin terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, maka hanya tenaga yang berpendidikan menengah atau menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang dapat menduduki profesi yang penting dengan bayaran yang cukup.⁴² Persaingan antara tenaga kerja yang berpendidikan dan berketrampilan dengan tenaga kerja yang kurang berpendidikan di mana-mana di menangkan oleh kelompok yang pertama.

Pendidikan mempengaruhi dan di pengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi dan kebudayaan suatu masyarakat.⁴³ Melalui hubungan timbal balik dari pendidikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka tingkat pendidikan dapat dijadikan indikator bagi perkembangan sebuah daerah. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam sebuah pembangunan. Namun, Terbatasnya jumlah fasilitas pendidikan, tenaga pendidik dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak anak-anak banyak yang tidak dapat tertampung di sekolah.

Penerapan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990 turut berkontribusi dalam peningkatan dalam pendidikan di Bojonegoro. Intensifikasi program Keluarga Berencana telah mampu menurunkan angka pertumbuhan penduduk dan penurunan jumlah rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Bojonegoro sehingga para rang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 8
Jumlah Anak-Anak dan Dewasa di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 1981-1990

No	Tahun	anak-anak	Dewasa	Jumlah penduduk
1	1981	307.206	733.526	1.040.732
2	1982	433.458	609.640	1.043.098

⁴² Yusuf, Maftuchah. *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana.1985. Hlm. 57

⁴³ DR. RK. Sembiring. *Demografi*. Jakarta: IKIP Jakarta Bekerja Sama dengan BKKBN. 1985. Hlm. 73

3	1983	446.652	571.533	1.018.185
4	1984	450.077	575.212	1.025.289
5	1985	450.161	588.351	1.038.512
6	1986	449.796	619.597	1.069.393
7	1987	457.611	620.873	1.078.484
8	1988	462.045	622.711	1.084.756
9	1989	460.252	630.046	1.090.298
10	1990	460.397	635.647	1.096.044

Sumber: BPS. *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 1981-1990*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik. Data diolah penulis

Pada tahun 1989 melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1989 pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hal ini merupakan sebuah peningkatan karena sebelumnya hanya wajib belajar 6 tahun.⁴⁴ keterbatasan jumlah sekolah menengah yang tidak sebanding dengan pendidikan sebelumnya, mengakibatkan banyak anak-anak tidak dapat melanjutkan pada jenjang sekolah menengah.

Dapat di ketahui bahwa dalam perkembangannya terjadi peningkatan jumlah Sekolah Dasar, SMTP, SMTA, jumlah peserta didik serta tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 1981-1990. Berikut ini jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari sekolah negeri, swasta dari sekolah inpres maupun non inpres. Perkembangan jumlah sekolah, guru serta murid di Kabupaten Bojonegoro dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 9

**Jumlah Sekolah,
Guru dan Murid SD, SMTP, SMTA
di Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-1990**

No	Keterangan	Tahun		
		1981	1986	1990
1.	Sekolah Dasar	778	782	1.017
	Guru	4.371	6.612	6.662
	Murid	161.774	177.992	166.242
2.	SMTP	81	116	124
	Guru	1.370	2.172	2.327
	Murid	23.117	34.376	34.871
3.	SMTA	30	53	66
	Guru	596	1276	1552
	Murid	7.635	16.895	19.332

Sumber: Sumber: BPS. *Sensus dan Statistik Pendidikan Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik .Diolah oleh penulis.

Jumlah penduduk yang sekolah dari tahun ke tahun semakin tinggi karena sifat integratif dari kebijakan pembangunan kependudukan ini antara lain terekspresikan dengan nyata dengan slogan pembangunan masyarakat sejahtera. Maka pemerintah juga menaruh perhatian luar biasa untuk meningkatkan dan mempermudah akses ke dunia pendidikan. Baik pada tingkat SD, SLTP/SLTA dan Perguruan Tinggi.

Tabel diatas menggambarkan perkembangan sarana pendidikan, tenaga pendidik dan jumlah peserta

didik di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1981-1990. Untuk katagori sekolah dasar, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam program Wajib Belajar 6 tahun yang dikumandangkan pada tahun 1984.⁴⁵ Pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat agar melaksanakan pendidikan minimal 6 tahun. Hal ini juga ditunjang dengan pembangunan sarana-sarana pendidikan diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Bojonegoro yang dikenal dengan SD Impres dan tenaga pendidik.

Untuk jenjang SMTP dan SMTA jumlah sekolah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jumlah infrastruktur yang ada nampaknya belum bisa menampung semua lulusan dari Sekolah Dasar sehingga menyebabkan banyak dari lulusan Sekolah Dasar tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena terbatasnya jumlah sekolah dan daya tampungnya. Daerah pedesaan memang banyak tertinggal, karenanya pertambahan anak-anak didaerah pedesaan kurang mampu dijangkau oleh pendidikan yang diperlukan.⁴⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pendidikan dipengaruhi dan mempengaruhi sosial ekonomi dalam masarakat. Peningkatan jumlah peserta didik berarti partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sudah mulai tinggi. Sadar pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro ini yang nantinya dapat memperbaiki pembangunan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.

Peranan program Keluarga Berencana memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Perlahan awal tahun 1980 pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukan grafik peningkatan. Hal tersebut di sebabkan salah satunya adalah adanya kebijakan program Keluarga Berencana. Pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Bojonegoro menerapkan program Keluarga Berencana seperti apa yang telah di instruksikan oleh pemerintah pusat.

Pengaruh yang di timbulkan adanya program Keluarga Berencana dalam pendidikan adalah jumlah anak usia sekolah yang terkontrol, dapat di tampung oleh keberadaan sekolah. Bawasannya harus di cermati pembangunan sekolah di Kabupaten Bojonegoro terjadi peningkatan secara perlahan setiap tahunnya. Dengan keberadaan program Keluarga Berencana jumlah angka kelahiran anak setidaknya pada tahun selanjutnya bisa di tampung di sekolah. Jumlah angka kelahiran anak pertumbuhannya harus disesuaikan dengan perkembangan pembangunan sekolah.

Kondisi pendidikan yang teratur seperti ini diharapkan akan meminimalkan terjadinya anak putus sekolah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan masyarakat yang baik akan tercipta kualitas masyarakat yang unggul, mampu

⁴⁴ S Hamid Hasan. *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Perkembangan Sekolah Dasar dan Menengah)*. Bandung; UPI . Hlm; 26

⁴⁵ Ibid., Hlm. 26

⁴⁶ Mafttuchah Yusuf. Op., cit. Hal. 55

bersaing, serta memiliki keterampilan yang baik. Kondisi seperti itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan suatu proses. Seperti apa yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan peningkatan jumlah infrastruktur, tenaga pendidik yang berkompeten. Menjadikan lulusan sekolah di Kabupaten Bojonegoro memiliki daya saing yang tinggi. Pengaruh yang di timbulkan adalah terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan taraf hidup itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain.

1. Mendapatkan pekerjaan yang layak dari setiap masyarakatnya.
2. Mengendalikan ekonomi dengan baik dan teratur karena penguasaan ilmu pengetahuan.
3. Memiliki karakter berani bersaing secara benar.
4. Memiliki jiwa kebersamaan yang mampu hidup secara berdampingan.

Pada dasarnya usaha pembangunan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mencapai keberhasilan memperoleh tenaga kerja yang mampu dan terampil untuk menangani pembangunan ekonominya.⁴⁷

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan program Keluarga Berencana yaitu dengan meningkatkan dan memantapkan peran seluruh instansi pemerintah, lembaga masyarakat maupun swadaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Untuk mendukung tercapainya program tersebut, pada tahun 1981-1990 pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan berbagai upaya yaitu dengan memantapkan program Keluarga Berencana, mendayagunakan secara optimal tenaga yang ada, meningkatkan kegiatan dengan diikuti sistem pelaporan setiap bulan, mempergunakan setiap media medis yang ada secara efektif, meningkatkan pembinaan melalui pendekatan kedinasan, melalui Dharma Wanita, PKK sampai tingkat Desa/ Dukuh dengan demikian diharapkan program tersebut semakin melembaga, pengaturan dan pelaksanaan TKBK secara terpadu dengan kegiatan lainnya, pemberian penghargaan melalui sistem lomba.

Berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menekan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana perlahan namun pasti telah dirasakan manfaatnya. Pada tahun 1981-1990 program Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro sedikit demi sedikit memperoleh hasil penekanan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Rata-rata dalam 10 tahun penerapan program Keluarga Berencana di Bojonegoro

tersebut mengalami kenaikan sebesar 2 % dari setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya pada tahun 1981-1990 jumlah peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro selalu meningkat setiap tahun. Kenaikan jumlah peserta Keluarga Berencana tahun 1981-1990 mencapai 85,5%. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kestabilan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 1981-1990. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk pada tahun 1981-1990 sebesar 0,95%. Rata-rata jumlah anggota keluarga juga dapat diturunkan sebesar 0,43 % pada tahun 1990.

Akibat penekanan jumlah penduduk, jumlah keluarga yang kecil, maka kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi. Sehingga dampaknya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan pendidikan anak dapat tercapai, serta ditunjang dengan kenaikan jumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1981-1990 terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro dilihat dari jumlah peningkatan ekonomi yang dimiliki. Peningkatan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat menyebabkan terjadi peningkatan dalam bidang pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Koran

Kompas, 9 Juli 1977

Buku

- Algiers Rahim Dkk.1987. *Pengetahuan Dasar Program Keluarga Berencana Bagi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1981. *Bojonegoro Dalam Angka 1981*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1982. *Bojonegoro Dalam Angka 1982*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1983. *Bojonegoro Dalam Angka 1983*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1984. *Bojonegoro Dalam Angka 1983*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1984. *Bojonegoro Dalam Angka 1984*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1985. *Bojonegoro Dalam Angka 1985*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1986. *Bojonegoro Dalam Angka 1986*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1987. *Bojonegoro Dalam Angka 1987*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.

⁴⁷ Ibid. Hlm. 58

- Badan Pusat Statistik (BPS). 1988. *Bojonegoro Dalam Angka 1988*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1989. *Bojonegoro Dalam Angka 1989*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1990. *Bojonegoro Dalam Angka 1990*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1990. *Sensus Dan Statistik Pendidikan Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1982. *Informasi Dasar Program Kependudukan KB*. Jakarta: BKKBN.
- Bappeda. 2002. *Pengkajian Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Bappeda.
- Bappeda. 1983. *Jawa Timur Membangun, Profil Daerah Tingkat II Se Jatim 1969-1982*. Surabaya: Bappeda.
- Bagian Hukum dan Tata Usaha bantuan Luar Negeri. 1982. *Himpunan Surat-Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Periode 1981*. Jakarta: Badan Pusat Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. 1995. *25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Keluarga Berencana dan Program Kependudukan*. Jakarta: BKKBN. 1981.
- Departemen Penerangan RI. 1983. *Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto di depan Sidang Umum MPR Republik Indonesia 11 Maret 1983*. Jakarta : Departemen Penerangan RI.
- Doda, Johosua. 1989. *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Entjang, Indan. 1981. *Pendidikan Kependudukan & Keluarga Berencana*. Jakarta; Alumni.
- Faturochman Dkk. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakannya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Julianto, Dadang. 2000. *30 Tahun Keluarga Berencana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan PKBI Yogyakarta.
- Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya; Unesa University Press.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa jawa: Silang Budaya (Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris)*. Jakarta: Garmedia Pustaka Utama.
- Pranoto, W Suharsono. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Panitia Penggali dan penyusun sejarah hari jadi Kabupaten Daerah tingkat II. 1988. *Sejarah Kabupaten Bojonegoro "Menyikap Kehidupan dari Masa ke Masa"*. Bojonegoro: Monalisa.
- MC. Riclefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta; Serambi.
- Sembiring, RK. 1985. *Demografi*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama Dengan BKKBN.
- Sri Moertiningsih Adieoetomo, Omas Bulan Samosir. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Sulistiyawati, Ari. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: sSalemba Medika.
- Tim BKKBN Jawa Timur. 1999. *Monografi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun 1998/1999*. BKKBN Propinsi Jawa Timur.
- Yusuf, Maftuchah. 1985. *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

Skripsi/ Tesis/ Jurnal:

- Peter Patta Sumbung. *Meningkatkan Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Indonesia Dalam PJTP-II*. Kertas Karya Perorangan 1992.
- S Hamid Hasan. *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Perkembangan Sekolah Dasar dan Meengah)*. Bandung: UPI.